




Research Article

## Ideologi Politik Dan Terjemah Al -Qur'an Indonesia

Naufal Hidayatullah<sup>1</sup>, Moh. Abdul Kholiq Hasan<sup>2</sup>, Ainur Rhain<sup>3</sup>, Kharis Nugroho<sup>4</sup>

1. Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail: [g108240009@webmail.ums.ac.id](mailto:g108240009@webmail.ums.ac.id) 

2. UIN Rades Mas Said Surakarta

E-mail: [hasanelqudsy@staff.uinsaid.ac.id](mailto:hasanelqudsy@staff.uinsaid.ac.id)

3. Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail: [ar175@ums.ac.id](mailto:ar175@ums.ac.id)

4. Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail: [kn812@ums.ac.id](mailto:kn812@ums.ac.id)



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : December 25, 2025

Revised : January 27, 2026

Accepted : February 12, 2026

Available online : March 11, 2026

**How to Cite:** Naufal Hidayatullah, Moh. Abdul Kholiq Hasan, Ainur Rhain and Kharis Nugroho (2026) "Political Ideology and Indonesian Translation of the Qur'an", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(1), pp. 2188–2200. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i1.3199.

### Political Ideology and Indonesian Translation of the Qur'an

**Abstract.** This study examines political ideology in Indonesian translations of the Qur'an. This study aims to analyze differences in word choice in the Qur'an that explain how political verses of the Qur'an are translated and interpreted in social, historical, and political contexts. Using a qualitative method based on literature study, this study examines the translations of the Ministry of Religious Affairs (2002 and 2019) and the Tafsir Al-Qur'anul Karim by Muhammad Yunus, focusing on verses related to politics. Linguistic-semantic and ideological analyses indicate significant differences that have implications for the nuances of meaning and political orientation. This study also identifies three ideological tendencies in understanding politics, including: traditionalist-authoritarian, revivalist-transformative, and modernist-contextual, which influence the reconstruction of the meaning of verses in translations. These findings confirm that translations of the Qur'an are not merely linguistic products, but ideological spaces influenced by the translator's social, political, and religious paradigms.

**Keywords:** Political Ideology, Translation of the Qur'an, Ministry of Religion.

**Abstrak.** Penelitian ini membahas ideologi politik dalam terjemah Al-Qur'an Indonesia. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pilihan kata dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bagaimana ayat-ayat politik Al-Qur'an diterjemahkan dan diinterpretasikan dalam konteks sosial, historis, dan politik. Melalui metode kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menelaah terjemahan Kemenag (2002 dan 2019) serta Tafsir Al-Qur'anul Karim karya Muhammad Yunus, dengan fokus pada ayat-ayat yang berkaitan dengan politik. Analisis linguistik-semantik dan analisis ideologi menunjukkan adanya perbedaan signifikan yang berimplikasi pada nuansa makna dan orientasi politik. Penelitian ini juga mengidentifikasi tiga kecenderungan ideologis dalam memahami politik, di antaranya : tradisionalis-otoriter, revivalis-transformatif, dan modernis-kontekstual yang mempengaruhi rekonstruksi makna ayat dalam terjemahan. Temuan ini menegaskan bahwa terjemahan Al-Qur'an bukan sekadar produk linguistik, melainkan ruang ideologis yang dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan paradigma keagamaan penerjemah.

**Kata Kunci :** Ideologi Politik, Terjemah Al-Qur'an, Kementrian Agama.

## PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman ibadah, tetapi juga sebagai sumber nilai, norma, dan panduan hidup dalam berbagai aspek, termasuk sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks politik, Al-Qur'an memuat banyak ajaran yang berkaitan dengan kepemimpinan, keadilan, musyawarah, tanggung jawab, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan terbentuknya ideologi politik Islami yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat. Namun, akses pemahaman terhadap nilai-nilai politik dalam Al-Qur'an sangat bergantung pada terjemahan yang digunakan. Terjemahan Al-Qur'an bukan hanya sekadar alih bahasa, tetapi juga sarana interpretasi yang dapat memengaruhi cara pembaca memahami pesan ilahi. Pemilihan kata, gaya bahasa, serta kecenderungan penafsir dalam menerjemahkan ayat-ayat politik dapat memberikan nuansa ideologis tertentu. Oleh karena itu, perbedaan terjemahan berpotensi menghasilkan pemahaman politik yang beragam di kalangan umat Islam.

Asumsi ini didasarkan pada realitas sejarah peradaban Islam bahwa Al-Qur'an merupakan teks keagamaan yang sangat produktif dalam melahirkan teks-teks turunan. Ia telah dieksplorasi dari berbagai bidang pemikiran dan sudut pandang sehingga menjadi pelabuhan dari berbagai doktrin pemikiran Islam. Atas dasar kenyataan itu, keragaman terjemahan Al-Qur'an yang lahir sepanjang perjalanan sejarah peradaban kaum muslim, tidak hanya dilihat dari sisi keragaman, bahasa dan aksara yang digunakan, tetapi juga terkait dengan politik dan ideologi terjemahan. Politik terjemahan yang dimaksudkan dalam penelitian ini lebih mengarah kepada pengertian politik sebagai kuasa dan otoritas yang dimiliki negara serta kebijakan-kebijakannya dalam penerjemahan Al-Qur'an. Sementara ideologi yang dimaksud mengacu kepada makna ideologi sebagai sistem berpikir atau sistem nilai dimiliki tim penerjemah yang merupakan superstruktur yang digunakan dalam menerjemahkan ayat-ayat Al-Qur'an yang menghasilkan infrastruktur berupa hasil terjemahan Al-Qur'an. (Rodin, 2021)

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pilihan kata dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bagaimana ayat-ayat politik Al-Qur'an diterjemahkan dan diinterpretasikan dalam konteks sosial, historis, dan politik. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian politik terjemahan, khususnya dalam memahami bagaimana ideologi dapat mewarnai proses penerjemahan teks suci. Selain itu, penelitian ini turut memperkaya literatur fiqh siyasah, ilmu tafsir, serta kajian interdisipliner yang menghubungkan antara agama dan politik. Secara lebih luas, penelitian ini juga menambah pemahaman mengenai dinamika semantik Al-Qur'an dan menunjukkan bagaimana makna ayat dapat mengalami perubahan melalui proses penerjemahan yang dipengaruhi oleh konteks sosial, historis, dan ideologis tertentu. Diharapkan para mahasiswa dan peneliti dapat memahami bahwa terjemahan Al-Qur'an tidak bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh konteks sosial-politik tertentu.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Ideologi**

Ideologi diartikan sebuah sistem nilai atau keyakinan yang diterima sebagai fakta atau kebenaran oleh kelompok tertentu. Ideologi berupaya menggambarkan mengenai karakteristik-karakteristik umum tentang alam dan masyarakat, serta keterkaitan antar hakikat dunia dengan hakikat moral, politik, dan panduan-panduan perilaku lainnya yang bersifat evaluatif. Oleh karena itu ia tidak sekedar memberi informasi tentang dunia ini sebenarnya tetapi juga merupakan petunjuk yang bersifat imperatif bagaimana seharusnya manusia/masyarakat bertindak. Prinsip dan petunjuk nilai yang bersifat imperatif dan evaluatif tersebut pada akhirnya mempengaruhi bagaimana tatanan atau struktur sosial masyarakat dibangun. Inilah yang disebut dengan ideologi.

Pada dasarnya hakikat dan fungsi ideologi merupakan hasil refleksi (perenungan dan pemantulan kembali) manusia terhadap dunia kehidupannya. Manusia melihat bahwa ada hal-hal yang baik dan hal-hal yang dianggap baik serta bagaimana cara mewujudkannya. Apabila hal tersebut dijalankan, maka akan terwujud kehidupan ideal seperti yang di cita-citakan. Ideologi bukan sekedar

pengetahuan teoritis belaka, tetapi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan. Ideologi adalah satu pilihan yang menuntut suatu komitmen untuk mewujudkannya. Semakin mendalam kesadaran ideologis seseorang berarti semakin tinggi pula komitmennya untuk melaksanakannya. Komitmen tercermin dalam sikap seseorang yang menyakini ideologinya sebagai ketentuan-ketentuan normatif yang harus ditaati dalam hidup masyarakat. (Isti'ana, 2024)

### **Definisi Politik Dalam Islam**

Politik dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasah. Oleh sebab itu, di dalam buku-buku para ulama salafush shalih dikenal istilah siyasah syar'iyah, misalnya seperti yang digunakan Abdur Rahman Taj dalam karyanya *As-Siyasat as-Syar'iyah wa al-fiqh al-Islami*, kata tersebut diterjemahkan dengan hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh nash-nash tafshili yang juz'i dalam Al-Qur'an dan sunnah. Siyasah berakar kata sâsa yasûsu berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Secara terminologis siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Abdul Wahab Khallaf mengutip pendapat al-Maqrizi mengatakan arti kata siyasah adalah mengatur dan beliau mendefinisikannya secara terminologis sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

Jadi, asalnya makna siyasah (politik) tersebut diterapkan pada pengurusan dan pelatihan gembalaan. Lalu, kata tersebut digunakan dalam pengaturan urusan-urusan manusia dan pelaku pengurusan urusan-urusan manusia tersebut dinamai politikus (siyasiyun). Dalam realitas bahasa Arab dikatakan bahwa ulil amri mengurus (yasûsu) rakyatnya saat mengurus urusan rakyat, mengaturnya, dan menjaganya. Begitu pula dalam perkataan orang Arab dikatakan : "Bagaimana mungkin rakyatnya terpelihara (masûsah) bila pemeliharanya adalah ngengat (sûsah)", artinya bagaimana mungkin kondisi rakyat akan baik bila pemimpinnya rusak seperti ngengat yang menghancurkan kayu. Dengan demikian, politik merupakan pemeliharaan (ri'ayah), perbaikan (ishlah), pelurusan (taqwim), pemberian arah petunjuk (irsyad), dan pendidikan (ta`dib). (Akbar, 2013)

### **Terjemah Al-Qur'an Indonesia**

Secara etimologis, terjemah berarti memindahkan atau mengalihkan suatu tuturan dari satu bahasa ke bahasa lainnya, sehingga dapat dipahami sebagai proses pengalihan bahasa (to translate). Penerjemahan sendiri merupakan kegiatan mengalihkan pesan dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Beragam definisi telah dikemukakan mengenai penerjemahan, di antaranya: memberikan penjelasan terhadap suatu pembicaraan menggunakan bahasa yang sama, menafsirkan ujaran dengan menggunakan bahasa lain, serta mengalihkan pesan dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Dalam hal ini perlu dibedakan antara istilah penerjemahan dan terjemahan. Penerjemahan mengacu pada proses pengalihan makna atau pesan, sedangkan terjemahan merujuk pada hasil akhir dari proses tersebut. Adapun

terjemah al-Qur'an berarti mengalihkan teks al-Qur'an ke dalam bahasa selain bahasa Arab, kemudian menyajikannya dalam bentuk naskah agar dapat dipahami oleh pembaca yang tidak menguasai bahasa Arab. Dengan demikian, terjemah al-Qur'an berfungsi sebagai perantara untuk membantu seseorang memahami pesan dan maksud yang terkandung dalam kitab Allah Swt melalui medium bahasa yang ia kuasai.

Terjemah al-Qur'an pada hakikatnya tidak hanya memindahkan bahasa, tetapi juga mengandung unsur penafsiran, karena di dalamnya terdapat upaya memahami dan menjelaskan makna ayat, meskipun dalam bentuk yang ringkas. Hal ini tampak dari adanya catatan kaki atau keterangan tambahan yang membantu menjelaskan maksud suatu ayat. Terjemahan memiliki kedudukan penting dalam proses pemahaman umat Islam Indonesia terhadap al-Qur'an, mengingat bahasa Arab bukanlah bahasa masyarakat Indonesia. Dengan demikian, pemahaman mayoritas umat Islam di Indonesia terhadap al-Qur'an umumnya diawali melalui pembacaan terjemahan al-Qur'an dalam bahasa Indonesia sebelum mendalami penafsiran yang lebih mendalam (Egi Sukma Baihaki, 2017).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), karena seluruh data bersumber dari teks-teks tertulis seperti terjemahan Al-Qur'an, kitab tafsir, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi Kementerian Agama. Data primer penelitian diperoleh dari beberapa versi terjemahan Al-Qur'an, terutama terjemahan Kemenag (2002 dan 2019) serta Tafsir Al-Qur'anul Karim karya Muhammad Yunus, khususnya pada ayat-ayat yang terkait dengan politik. Sementara itu, data sekunder dihimpun dari buku dan jurnal tentang ideologi politik, fiqh siyasah, serta pandangan para tokoh/ulama' kontemporer di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur, kemudian dianalisis menggunakan analisis linguistik-semantik, analisis ideologi, dan analisis perbandingan untuk melihat bagaimana pilihan kata dalam terjemahan mencerminkan orientasi ideologis tertentu. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan pengecekan silang antara berbagai versi terjemahan serta konteks sosial-politik yang melatarbelakanginya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ideologi Politik dan Terjemah Al Qur'an**

Dalam perkembangan perpolitikan sejak era Nabi sampai sekarang akan kita temui berbagai macam ragam gaya politik dan komunikasi politik, baik itu ketika khalifah yang empat berkuasa sampai ke era modern yang kita kenal sekarang, tetapi dari semua itu tidak akan terlepas dari Al-qur'an sebagai pedoman penghayatan dan peraturan yang dijunjung tinggi oleh penguasa-penguasa negeri Islam.

Imam Al-Qurthubiy dalam Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Qur'an menyatakan, seorang pemimpin harus menjalankan amanat yang telah dibebankan kepadanya dengan tidak melakukan kezaliman, adil dalam menegakan hukum, serta cerdas dalam mengelola keuangan Negara. Bahkan lebih jauh, Al Qurthubiy mengatakan bahwa untuk

menjalankan Amanah merupakan inti dari setiap aturan-aturan yang harus dijalani. Itu artinya, betapa fundamental aspek amanat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dalam konteks kekuasaan politik, Al-qur'an memerintahkan Nabi Muhammad Saw untuk menyampaikan pernyataan tegas berikut :

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ  
الْحَيْزُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

Artinya : “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai Allah, Pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (Q.S. Ali Imran : 26)

Dalam terjemahan Al-Qur'anul Karim karya Muhammad Yunus, kata (الملك) diterjemahkan sebagai “kerajaan”, sehingga ayat tersebut berbunyi, “Ya Allah yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari siapa yang Engkau kehendaki” (Yunus, 1988). Pemilihan kata “kerajaan” mencerminkan gaya bahasa Melayu klasik serta mengikuti tradisi tafsir awal yang memahami al-mulk sebagai entitas politik yang konkret, termasuk pergantian dinasti dan peradaban. Dengan pilihan ini, Muhammad Yunus menekankan bahwa Allah berkuasa mengalihkan kerajaan dari satu umat atau bangsa kepada umat lainnya, sebagaimana yang terjadi dalam sejarah Bani Israil dan umat-umat terdahulu. Sementara itu, terjemahan Kemenag memilih kata “kekuasaan” karena dianggap lebih fleksibel, modern, dan mencakup makna yang lebih luas. Dalam bahasa Indonesia kontemporer, “kekuasaan” tidak hanya merujuk pada kerajaan, tetapi juga pada seluruh bentuk otoritas dan kepemimpinan, baik politik, sosial, maupun moral. Pilihan ini menghindari kesan bahwa ayat hanya berbicara tentang sistem monarki, melainkan menegaskan bahwa Allah mengatur segala bentuk kekuasaan dalam segala konteks zaman.

Seperti tersurat di dalam ayat di atas, Allah SWT menganugerahkan kepada manusia sebagian kekuasaan itu. Di antara mereka ada yang berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik karena mengikuti prinsip-prinsip kekuasaan dan ada pula yang gagal. Dalam konsepsi Islam, manusia memikul amanah (amanah ibadah dan amanah risalah). Amanah ini boleh jadi sebagai konsekuensi dari deklarasi universal yang pernah dinyatakan manusia dihadapan Allah dan sekaligus menjadi Amanah risalah berkaitan dengan kedudukan manusia sebagai khalifatullah fi Al-Ardh.

Kedudukan itu mencakup aktivitas manusia dalam memakmurkan dan memelihara bumi, menata kehidupan dan menyejahterakan umat manusia. Aktivitas ini jelas-jelas merupakan suatu tindakan dan fungsi siyasah manusia yang otentik. Oleh sebab itu, amanah risalah dalam pengertiannya yang luas menegaskan bahwa manusia adalah makhluk siyasah yang bertanggungjawab atas terpeliharanya keteraturan hidup ditengah-tengah masyarakat manusia dan lingkungan hidupnya, sedangkan siyasah memakmurkan

bumi dalam Islam memiliki tujuan dan sekaligus menjadi cara, jalan dan sarana untuk meraih tujuan yang lebih mulia dan lebih abadi, yaitu keselamatan kehidupan yang lebih bermakna dan kekal, kehidupan akhirat. (Kahpi, 2020).

Dalam sebuah politik, tidak terlepas dari yang namanya pemimpin. Tanpa pemimpin, maka pemerintahan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Di dalam Al-Qur'an ada ayat yang membahas tentang "awliya" atau yang bisa diterjemahkan sebagai "pemimpin", "pelindung", atau "teman setia". Dalam terjemahan Al-Qur'an versi lama Kementerian Agama (Kemenag), tampak adanya pergeseran pilihan kata yang memiliki makna ideologis dan politis. Istilah ini diterjemahkan secara berbeda sesuai konteks ayat. Misalnya, dalam Q.S. Al-Maidah : 51

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ... ﴾

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu). Sebagian mereka menjadi teman setia bagi sebagian yang lain. (Q.S. Al-Maidah : 51)

Dalam terjemahan Kemenag versi lama menerjemahkannya sebagai "pemimpin", sementara revisi terbaru memilih kata "teman setia". Perubahan ini bukan sekadar linguistik, tetapi juga menunjukkan adanya pertimbangan sosial dan politik, karena pilihan kata yang lebih halus dianggap lebih sesuai dengan semangat kerukunan antaragama dan moderasi Islam di Indonesia. Dengan menafsirkan istilah seperti awliya' secara kontekstual, Kemenag berupaya menampilkan wajah Islam yang damai dan sejalan dengan ideologi Pancasila serta prinsip wasathiyah (jalan tengah). Namun, hal ini juga menimbulkan perdebatan sebagian pihak menilai perubahan tersebut bisa mengaburkan makna asli, sementara yang lain melihatnya sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi sosial-politik bangsa yang plural. Dengan demikian, terjemahan Al-Qur'an versi Kemenag bukan hanya produk bahasa atau tafsir, tetapi juga mencerminkan ideologi politik negara yang berusaha menjaga keseimbangan antara keagamaan, kebangsaan, dan keutuhan sosial.

### **Pandangan Ulama'/Tokoh Kontemporer Indonesia Terhadap Ideologi Politik**

#### 1. KH. Hasyim Muzadi

KH. Hasyim Muzadi, mantan Ketua Umum Nahdlatul Ulama (NU), berpendapat bahwa negara harus berfungsi sebagai pelindung semua warganya tanpa memandang agama dan keyakinan. Menurut beliau, konsep negara dalam Islam adalah negara yang memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Negara juga harus menjamin kebebasan beragama dan menghormati hak-hak asasi manusia. KH. Hasyim Muzadi menekankan bahwa hukum Islam harus diterapkan dengan cara yang adaptif dan kontekstual, sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan Masyarakat.

#### 2. M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab, seorang ulama dan cendekiawan Islam terkemuka di Indonesia, menekankan pentingnya prinsip musyawarah (syura) dalam pemerintahan Islam. Menurut Quraish Shihab, syura adalah proses demokratis yang harus diadopsi dalam pengambilan keputusan politik. Negara Islam idealnya harus berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan umum, dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Quraish Shihab juga menekankan pentingnya toleransi dan keberagaman dalam negara, mengingat Indonesia adalah negara dengan pluralitas agama dan budaya yang tinggi.

3. KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur)

KH. Abdurrahman Wahid, yang dikenal sebagai Gus Dur, menekankan pentingnya demokrasi dan hak asasi manusia dalam konteks negara Islam. Menurut Gus Dur, negara harus berfungsi sebagai pelindung hak-hak minoritas dan menjaga harmoni sosial. Beliau juga berpendapat bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sejalan dengan nilai-nilai Islam, terutama dalam hal keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Gus Dur menekankan pentingnya kebebasan beragama dan penghormatan terhadap perbedaan sebagai dasar bagi pembangunan negara yang inklusi.

4. Dr. Din Syamsudin

Dr. Din Syamsuddin, mantan Ketua Umum Muhammadiyah, berpendapat bahwa negara dalam Islam harus berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Beliau menekankan pentingnya penerapan hukum Islam dalam konteks yang demokratis dan pluralistik. Din Syamsuddin juga menyoroti peran ulama dan intelektual Muslim dalam memberikan panduan moral dan etika bagi pengelolaan negara. Menurutnya, negara Islam harus berfungsi untuk mencapai kemaslahatan umum (maslahah) dan mencegah kemudharatan (mafsadah) bagi masyarakat. (Surono, 2024)

### **Prinsip Dasar Ideologi Politik Dalam Al-Qur'an**

Prinsip dasar ideologi politik dalam Al-Qur'an merupakan nilai-nilai pokok yang menjadi landasan bagi sistem pemerintahan dan tata kelola kekuasaan menurut Islam. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat, tetapi juga menegaskan tujuan politik dalam Islam, yaitu mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan ketaatan kepada Allah. Berikut adalah prinsip dasar politik dalam Al-Qur'an :

1. Ketauhidan

Dasar kekuatan politik Islam yang pertama adalah Allah SWT, tidak ada seorangpun yang memiliki kekuasaan mutlak. Kekuasaan manusia hanya bersifat temporal karena yang berkuasa secara mutlak adalah Allah SWT, Tuhan semesta alam, Tuhan langit dan bumi. Kekuasaan Allah tidak bias dibatasi oleh kekuatan hukum yang ada, karena Ia sendiri adalah sumber dari hukum tersebut.

2. Musyawarah (Syura)

Asas musyawarah yang paling utama adalah berkenaan dengan pemilihan ketua negara dan orang-orang yang akan menjawab tugas-tugas utama dalam pentadbiran ummah. Asas musyawarah yang kedua adalah berkenaan dengan penentuan jalan dan cara pelaksanaan undang-undang yang telah dimaktubkan di dalam Al-Quran dan As-

Sunnah. Asas musyawarah yang seterusnya ialah berkenaan dengan jalan-jalan bagi menentukan perkara-perkara baru yang timbul di kalangan ummah melalui proses ijtihad.

3. Persaudaraan (ukhwah)

Prinsip ini menggambarkan semangat saling mendukung, menghormati, dan peduli terhadap sesama manusia tanpa memandang perbedaan ras, agama, atau suku. Pada dasarnya semua manusia dipandang setara di hadapan Allah. Tidak ada keistimewaan kecuali karena ketaqwaan. (Irwansyah, 2023)

4. Keadilan ('Adl)

Keadilan merupakan inti dari politik Islam. Pemerintahan yang adil menjadi syarat tegaknya sebuah masyarakat yang diridhai Allah. Pemimpin dan rakyat wajib menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Persamaan (Musawah)

Persamaan di sini terdiri daripada persamaan dalam mendapatkan dan menuntut hak, persamaan dalam memikul tanggung jawab menurut peringkat-peringkat yang ditetapkan oleh undang-undang perlembagaan dan persamaan berada di bawah kuat kuasa undang-undang.

5. Amanah

Kekuasaan dalam Islam adalah amanah, bukan hak milik pribadi. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya di hadapan Allah dan rakyat.

6. Kebebasan (Al Hurriyah)

Prinsip ini merupakan yang sangat mendasar bagi hakekat kemanusiaan. misalnya kebebasan beragama yang menjadi suatu pilihan manusia yang paling substansial. Prinsip ini saling menghormati antar sesama warga masyarakat. Prinsip ini berlaku universal, bukan hanya terhadap masalah yang bersifat profan tapi juga yang bersifat sakral, seperti toleransi dan menghormati agama-agama lain.

7. Kemaslahatan Ummat (Maslahah)

Tujuan utama dari adanya sebuah politik adalah mencapai kemaslahatan umum, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (maqasid asy-syari'ah). Semua kebijakan negara harus membawa manfaat dan mencegah kerusakan.

### **Konsep Ulil 'Amri Dalam Surah An-Nisa' : 59**

Kata Ulul Amr (selanjutnya baca ulil amri) adalah susunan dari dua suku kata yaitu ulu dan al 'amr. Kata ulu diartikan dengan yang punya, yang memiliki misalnya dalam kata ulil al quwwah yang berarti memiliki kekuatan, uli al-bab berarti yang mempunyai pikiran. Kata ini dijumpai dalam al-Qur'an dengan berbagai macam kata pasangannya. Umpamanya ia berpasangan dengan ulil ilm berarti yang punya ilmu, ulul ba's berarti yang punya kekuatan/kekuasaan, ulu al-azm berarti yang punya ketegaran/keteguhan, dan lainnya. Sedangkan kata al-amr berarti kerajaan, urusan, perkara dan semacamnya. Kata ini dijumpai dalam bentuk tunggal dan jamaknya dalam al-Qur'an sebanyak 169 kali. Kata ini mempunyai makna semantik yang banyak. Ia bisa berarti hari kiamat, hari akhirat, agama Islam, perintah, perkara secara umum.

Berikutnya, kata amir diturunkan dari kata amira yang berarti menjadi amir (raja). Amir bermakna "pemimpin". Atas dasar makna ini, amir didefinisikan dengan "seorang penguasa yang melaksanakan urusan". Bentuk jamaknya (amira) adalah umara' yang berarti para penguasa, para pemimpin dan para komandan. Kata amir tidak digunakan oleh al-Qur'an, tapi yang ada ulil amri, dalam kamus diberi arti (para pemimpin dan ahli

ilmu pengetahuan). Akan tetapi teks-teks Hadits Nabi Saw, banyak digunakan kata amir dan umara'. Hadits-hadits dimaksud menggambarkan pentingnya peranan pemimpin dalam kehidupan masyarakat, dan pemimpin harus benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat. Istilah amir digunakan untuk gelar bagi jabatan-jabatan penting yang bervariasi dalam sejarah pemerintahan Islam dengan sebutan yang beragam. Seperti amir al-mu'minin, amir al-muslimin, amir al-umara' dan amir saja. Karena itu, ia bisa digunakan untuk gelar bagi kepala pemerintahan di daerah dan gelar bagi penguasa militer.

Istilah ulil amri berkenaan dengan kehidupan bernegara, dapat diartikan sebagai pemimpin, amir, presiden atau raja. Arti kata ini diambil dari makna yang dikandung oleh surat an-Nisa' ayat 59, karena ayat tersebut mewajibkan ketaatan kepada Allah, Rasul dan ulil amri yang dianggap sebagai pemimpin komunitas masyarakat muslim sepeninggal Rasulullah Saw. (Bay, 2011)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antaramu. (Q.S. An-Nisa' : 59)

Potongan ayat (وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ) dalam Surah An-Nisa' 59 mendapatkan penjelasan yang berbeda antara terjemahan Kemenag versi baru (2019) dan versi lama (2002). Pada terjemahan Kemenag versi baru, istilah Ulil Amri dipertahankan apa adanya, lalu diberi keterangan dalam tanda kurung sebagai "pemegang kekuasaan". Formulasi ini mencerminkan pendekatan yang lebih hermeneutik dan akademis, karena dengan mempertahankan istilah Arabnya, makna Ulil Amri tetap terbuka untuk cakupan yang luas sesuai tradisi tafsir klasik baik pemimpin politik, ulama, hakim, maupun otoritas yang memiliki kewenangan dalam menjaga ketertiban dan hukum (Kemenag, 2019). Sebaliknya, terjemahan Kemenag versi lama hanya mencantumkan istilah Ulil Amri dengan padanan fungsional seperti "pemerintah", sehingga pembacaan ayat menjadi lebih sempit dan fokus pada pemimpin negara saja (Kemenag, 2002). Perbedaan gaya penerjemahan ini memunculkan implikasi teologis dan politis yang signifikan: versi lama lebih menekankan ketaatan terhadap pemerintah secara langsung, sedangkan versi baru memberi ruang interpretasi yang lebih seimbang dan sesuai dengan konsep otoritas berjenjang dalam Islam. Dengan demikian, perbedaan redaksi ini tidak sekadar teknis, tetapi menentukan cara pembaca memahami hubungan antara masyarakat, ulama, dan pemerintah dalam struktur otoritas Islam.

## Ideologi Politik Berdasarkan Tiga Ranah Pendekatan

### 1. Pendekatan Tradisionalis-Otoriter

Pendekatan ini berangkat dari kerangka tafsir klasik yang berkembang pada era monarki Timur Tengah, ketika kekuasaan politik dipahami sebagai struktur hierarkis yang menuntut ketaatan penuh kepada penguasa. Dalam pendekatan ini, ayat-ayat tentang ulil amri sering diterjemahkan dan ditafsirkan dengan nuansa legitimatif: penguasa dipandang sebagai pihak yang hampir tidak boleh digugat selama tidak memerintahkan

kemaksiatan secara terang-terangan. Terjemahan cenderung mempertahankan istilah-istilah lama tanpa upaya kontekstualisasi, sehingga hubungan antara rakyat dan pemimpin lebih banyak diletakkan pada prinsip ketaatan, bukan akuntabilitas. Secara epistemologis, pendekatan ini memandang stabilitas sebagai nilai utama dalam politik Islam, sehingga teks dipahami untuk mengamankan tatanan sosial yang mapan. Keterikatan yang kuat pada otoritas ulama klasik membuat terjemahan bersifat normatif, rigid, dan kurang membuka ruang bagi reinterpretasi dalam konteks negara bangsa modern.

2. Pendekatan Revivalis-Transformatif (Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir)

Pendekatan ini menempatkan Al-Qur'an sebagai dasar legitimasi bagi proyek politik tertentu, misalnya pendirian daulah Islamiyah atau khilafah. Terjemahan ayat-ayat terkait kekuasaan, hukum, dan masyarakat sering diberi muatan politis yang eksplisit, dengan menonjolkan konsep penerapan syariat secara menyeluruh (kaffah) dan kewajiban menegakkan struktur pemerintahan Islam. Makna ayat-ayat yang semula bersifat universal, etis, atau moral sering disempitkan menjadi pemaknaan legalistik. Misalnya, ayat tentang keadilan dipahami sebagai keharusan penerapan hukum berbasis syariat formal; ayat tentang persatuan umat diterjemahkan sebagai mandat menuju satu kepemimpinan global umat Islam. Dengan kerangka berpikir aktivis, pendekatan ini memandang teks suci sebagai peta jalan politik yang bukan hanya normatif, tetapi operasional. Oleh karena itu, sifat terjemahan sering lebih berorientasi pada mobilisasi massa dan perubahan sistem politik ketimbang pada pemahaman keagamaan yang plural dan kontekstual.

3. Pendekatan Modernis-Kontekstual (Quraish Shihab dan Nurcholish Madjid)

Pendekatan ini berusaha membaca ayat-ayat Al-Qur'an melalui lensa sosiologis, historis, dan linguistik yang mempertimbangkan dinamika masyarakat modern. Prinsip-prinsip moral Al-Qur'an seperti keadilan (al-'adl), musyawarah (asy-syūrā), kemaslahatan (maṣlaḥah), persamaan manusia, dan anti-kezaliman dipandang sebagai nilai dasar yang dapat diterjemahkan dalam berbagai bentuk institusi politik, termasuk demokrasi modern. Dalam pendekatan ini, terjemahan tidak hanya memindahkan teks ke bahasa Indonesia, tetapi juga berupaya menjelaskan pesan normatifnya agar tetap relevan dalam konteks negara bangsa, pluralisme, dan hak asasi manusia. Misalnya, ayat tentang ulil amri tidak ditafsirkan sebagai legitimasi otoritarianisme, tetapi sebagai prinsip kepemimpinan yang harus dijalankan dengan akuntabilitas moral dan mekanisme kontrol publik. Dengan demikian, bentuk negara bukan dianggap ketetapan teologis, melainkan wadah yang bisa berubah sesuai realitas sosial, selama tetap membawa nilai-nilai etik Qur'ani. Pendekatan ini cenderung inklusif, humanis, dan menekankan dialog antara teks dan konteks.

## **KESIMPULAN**

Adanya perbedaan pilihan kata dalam terjemahan seperti terjemahan Kemenag, dalam perubahan terjemahan awliyā' dari "pemimpin" menjadi "teman setia", atau perbedaan terjemahan al-mulk antara Muhammad Yunus ("kerajaan") dan Kemenag ("kekuasaan"), bukan hanya perbedaan semantik, tetapi juga merupakan bentuk politik terjemahan. Terjemahan Kemenag berusaha menampilkan wajah Islam yang moderat, inklusif, dan kompatibel dengan Pancasila, sehingga

pilihan kata cenderung lebih halus, pluralistik, dan akomodatif. Sebaliknya, terjemahan klasik seperti karya Muhammad Yunus menggunakan istilah yang lebih dekat dengan tradisi tafsir lama dan konteks sejarah monarki, sehingga kesan politiknya lebih tegas dan dominatif.

Konsep politik dalam Al-Qur'an berlandaskan pada prinsip-prinsip universal seperti tauhid, musyawarah, keadilan, persamaan, amanah, dan kemaslahatan. Prinsip-prinsip ini dapat diinterpretasikan dengan berbagai pendekatan : tradisional-otoriter yang menekankan ketaatan, revivalis-transformatif yang mendorong agenda politik Islam formal, serta modernis-kontekstual yang lebih menekankan etika Qur'ani dalam kerangka negara bangsa modern. Ketiga pendekatan tersebut menunjukkan bahwa ideologi politik dalam Islam tidak tunggal, tetapi cair dan sangat dipengaruhi oleh cara membaca dan menerjemahkan teks suci.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa terjemahan Al-Qur'an adalah ruang ideologis, di mana ulama' dan negara berinteraksi untuk menafsirkan ideologi politik. Perbedaan terjemahan baik dalam pilihan kata maupun penekanan makna mencerminkan pergulatan antara teks, konteks sosial, dan orientasi ideologis masing-masing pihak. Oleh karena itu, pemahaman terhadap politik Islam yang bersumber dari terjemahan harus selalu mempertimbangkan latar belakang ideologi penerjemah, konteks sosial politik, dan tujuan terjemahan itu sendiri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akbar, A. (2013). Konsep politik dalam alqur'an. *Journal Analytica Islamica*, Vol. 2, No, 143-144. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/view/400/304>
- Bay, K. (2011). Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur ' an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim. *Jurnal Ushuludiin*, Vol.17, No, 117-118. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/686/637>
- Egi Sukma Baihaki. (2017). PENERJEMAHAN AL-QUR'AN: PROSES PENERJEMAHAN AL-QUR'AN DI INDONESIA. *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 25, N, 45-47. <https://doi.org/10.24014/jush.v25i1.2339>
- Irwansyah, Z. S. (2023). PRINSIP-PRINSIP FIQH SIYASAH. *Jurnal Cerdas Hukum*, Vol.2, No. <https://ejournal.institutidayatullahbatam.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/219/118>
- Isti'ana, A. (2024). Ideologi dan Paradigma Politik Pendidikan Islam. *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 74-82. <https://journal.staittd.ac.id/index.php/at/article/view/64>
- Kahpi, M. L. (2020). Komunikasi Politik Dalam Al-Quran. *Hikmah : Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi Islam*, Vol.14, No, 154-157. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/Hik/article/view/2496>
- Kemenag. (2002). Al Qur'an dan Terjemahannya : Edisi 2002. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Gur'an. [https://archive.org/details/id\\_Translation\\_of\\_the\\_meaning\\_of\\_the\\_holy\\_qur\\_an\\_in\\_indonesian/page/n7/mode/2up](https://archive.org/details/id_Translation_of_the_meaning_of_the_holy_qur_an_in_indonesian/page/n7/mode/2up)
- Kemenag. (2019). Al Qur'an dan Terjemahannya : Edisi Penyempurnaan 2019.
- Rodin, D. (2021). Negara dan Kitab Suci: Politik dan Ideologi Terjemahan Al-Qur'an

- Kementerian Agama. 2(2).  
[https://etheses.uinsgd.ac.id/45102/%0Ahttps://etheses.uinsgd.ac.id/45102/2/2\\_abstrak.pdf](https://etheses.uinsgd.ac.id/45102/%0Ahttps://etheses.uinsgd.ac.id/45102/2/2_abstrak.pdf)
- Surono, Y. (2024). Memaknai Negara , Agama , dan Ideologi Politik dalam Kajian Fiqih Kontemporer. 03(02), 34-45.
- Yunus, M. (1988). Tafsir Al-Qur'an Al-Karim (1st ed.). KLANG BOOK CENTRE.  
<https://dn790002.ca.archive.org/o/items/kumpulan-kitab-buku-tafsir/TAFSIR QURAN KARIM by Mahmud Yunus .pdf>